

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL  
DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SI)  
Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**DIKA NOVI ELTHA**  
**BP: 2018/18060089**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**

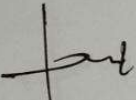
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN  
INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI SUMATERA BARAT 2017-2021

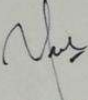
Nama : Dika Novi Eltha  
NIM/TM : 18060089/2018  
Keahlian : Perencanaan dan Pembangunan  
Departemen: Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2023

Mengetahui,  
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi

  
Dr. Novva Zulva Riani, S.E., M.Si  
NIP. 1971104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Pembimbing

  
Mike Triani, SE. MM  
NIP. 19840129 200912 2 002

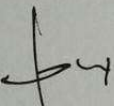
LEMBARAN PENGESAHAN ARTIKEL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN  
INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA  
BARAT


Nama : Dika Novi Eltha  
NIM/TM : 18060089/2018  
Keahlian : Ekonomi Perencanaan  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2023

Mengetahui,  
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi

  
Dr. Novya Zulva Riani, S.E., M.Si  
NIP. 19711184 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Pembimbing

  
Mike Triani, SE., M.M  
NIP. 19840129 200912 2 002

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**


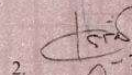

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA MODAL  
DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2021**

Nama : Dika Novi Eltha  
NIM/TM : 18060089/2018  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Perencanaan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2023

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	TandaTangan
1	Ketua	: Mike Triani, SE. MM	1. 
2	Anggota	: Isra Yeni, SE. M.SE	2. 
3	Anggota	: Drs. Ali Anis, MS	3. 

### Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dika Novi Eltha
NIM/Th. Masuk	: 18060089/2018
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sitiung, 17 Juli 1999
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Perencanaan
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Dharmasraya
No. Hp/Telephone	: 082386182886
Judul Skripsi	: PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali tertulis jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan kepala departemen program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 17 Juli 2023



**Dika Novi Eltha**  
NIM. 18060089

## ABSTRAK

### PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT

Dika Novi Eltha<sup>1</sup>, Mike Triani<sup>2</sup>

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Pertumbuhan ekonomi adalah metrik yang digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, yang merupakan jumlah nilai tambah dari semua bisnis di wilayah tersebut. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu metrik utama yang digunakan untuk mengevaluasi ekonomi suatu wilayah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendapatan asli daerah, belanja modal dan investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Variabel dalam analisis ini adalah pendapatan asli daerah, belanja modal, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menggunakan teknik kuantitatif seperti pendekatan deskriptif dan asosiatif. Untuk 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat diperoleh data sekunder dari instansi terkait dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada saat model regresi data panel model yang digunakan adalah *Model fixed effect* dievaluasi dengan bantuan *Chow's Test*, *Hausman's Test*, dan *Classical Assumption Test*. Hasil pengujian teoritis menunjukkan bahwa respon output pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, namun pengaruh signifikan secara statistik. Setiap peningkatan belanja modal akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat karena produksi belanja modal memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesejahteraan rakyat akan terwujud.

**Kata kunci:** pendapatan asli daerah, belanja modal, investasi, pertumbuhan ekonomi

## ABSTRACT

Economic growth is a metric used to assess a nation's economic progress. Economic growth is measured by a region's gross domestic product (GDP), which is defined as the total added value created by all business units in the region. The gross domestic product is one of the primary metrics used to evaluate an area's economy over time. As a result, the focus of this study is on the factors that fueled West Sumatra's economic growth. The purpose of this study is to ascertain the extent to which regional primary income and capital expenditure influence economic expansion in West Sumatra. The variables in this analysis are capital expenditure, economic expansion, and local revenue (PAD). The research makes use of quantitative techniques like descriptive and associative approaches. Secondary data for 19 West Sumatra Province regencies and cities were obtained from relevant authorities between 2017 and 2021. The fixed effect model is evaluated with the help of the Chow test, the Hausman test, and the classical assumption test when panel data regression models are used. The results of theoretical testing indicate that the output response of regional original income has a negative effect on economic growth in West Sumatra, but this effect is statistically significant. However, because the production of capital expenditures has a significant positive effect on the expansion of the economy of West Sumatra, any increase in capital expenditures will have an effect on the expansion of the economy of West Sumatra. Investment has a negative and insignificant effect on economic growth. With high economic growth, people's welfare will become a reality.

*Keywords: local revenue, capital expenditure, investment, economic growth*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil' alamin*, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya kepada umatnya. Atas izin dan kehendak Allah SWT penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2017-2021”.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini atas izin Allah SWT sebagai pemegang kendali. Penulis juga sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi, semua ini tidak terlepas dari doa dan dukungan segenap keluarga besar yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang maksimal. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang selalu menunggu untuk pulang, yang selalu mendoakan, memotivasi, menasehati, memberikan semangat baik moril maupun material kepada



penulis demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Mike Triani SE, MM selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE. ME selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Bapak Dr. Joan Marta, SE, M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Isra Yeni, SE. M.SE dan Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
7. Kak Asma Lidya, Amd selaku admin departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.

8. Kepada saudara penulis yang selalu video call keluarga hampir setiap malam yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Ekonomi dan khususnya departemen Ilmu Ekonomi 2018 yang banyak memberikan saran, serta bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca terhadap skripsi ini agar dapat menjadi karya yang bernilai dan bermanfaat.

Padang, Mei 2023

Dika Novi Eltha

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. ....	L
atar Belakang .....	1
B. ....	R
umusan Masalah .....	17
C. ....	T
ujuan Penelitian .....	18
D. ....	M
manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. ....	P
umbuhan Ekonomi.....	20
B. ....	P
endapatan Asli Daerah.....	25
C. ....	B
elanja Modal .....	30
D. ....	I
nvestasi .....	35
E.....	H
ubungan-hubungan Antar Variabel .....	42
1.....	H
ubungan antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi.....	42
2.....	H
ubungan antara Belanja modal dan Pertumbuhan Ekonomi.....	45
3.....	H
ubungan antara Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi.....	47
F.....	P
enelitian Terdahulu .....	49
G. ....	K
erangka Konseptual .....	50
H. ....	H
ipotesis .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. ....	J
enis Penelitian.....	53
B. ....	T
empat dan Waktu Penelitian .....	53

C.	.....	J
enis dan Sumber Data	.....	53
D.	.....	T
eknik Pengumpulan Data	.....	54
E.	.....	D
efenisi Operasional	.....	55
F.	.....	T
eknik Analisis Data	.....	57
1.	.....	A
nalisasi Deskriptif	.....	57
2.	.....	A
nalisasi Induktif	.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	<b>.....</b>	<b>70</b>
A.	.....	G
ambaran Umum Lokasi Penelitian	.....	70
B.	.....	A
nalisasi Deskriptif	.....	72
C.	.....	A
nalisasi Induktif	.....	78
D.	.....	P
embahasan	.....	87
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>.....</b>	<b>94</b>
A.	.....	K
esimpulan	.....	94
B.	.....	S
aran	.....	95
<b>Daftar pustaka</b>	<b>.....</b>	<b>97</b>
<b>Lampiran</b>	<b>.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laju Pertumbuhan Eonomi Provinsi Sumatera Barat .....	5
Tabel 1.2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat .....	10
Tabel 1.3 Data Realisasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat .....	13
Tabel 1.4 Data Realisasi Investasi Dari Proyek PMA Provinsi Sumatera Barat ...	15
Tabel 3.1 Nilai Durbin Watson .....	65
Tabel 4.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat .....	73
Tabel 4.2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat .....	75
Tabel 4.3 Data Realisasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat .....	76
Tabel 4.4 Data Realisasi Investasi Dari Proyek PMA Provinsi Sumatera Barat ...	78
Tabel 4.4 Hasil Chow Test .....	79
Tabel 4.5 Hasil Hausman Test .....	79
Tabel 4.6 Hasil Uji White .....	81
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonearitas .....	81
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokeralasi .....	82
Tabel 4.9 Hasil Regresi Panel Fixed Effect Model .....	83
Tabel 4.10 Hasil Uji F .....	85
Tabel 4.11 Hasil Uji t .....	85
Tabel 4.12 Hasil Uji $R^2$ .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	51
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004). Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas, karena tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

(Jaya, 2014), menyatakan kalau perkembangan ekonomi merupakan pertumbuhan dari aktivitas perekonomian dimana hal tersebut berakibat pada jumlah produksi barang dan jasa yang terus menjadi meningkat sehingga kemakmuran masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi bisa tercapai lewat penerapan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah

daerah untuk mengurus, meningkatkan, serta menggali kemampuan yang dimiliki tiap-tiap daerah.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985 dalam Adyatma & Oktaviani, 2015). Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah disebut PDRB (Jaya & Dwirandra, 2014). Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Hal ini senada dengan teori menurut (Kusumawati & Wiksuana, 2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Kinerja perekonomian di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dijelaskan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2017-2021 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi -1,62%. Hal ini disebabkan oleh “Peningkatan yang didorong oleh aktivitas ekonomi yang lebih baik seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas menyusul kasus COVID-19 yang lebih terkendali di tahun 2021. Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh seluruh komponen-komponen pengeluaran terutama pada konsumsi RT, ekspor



luar negeri dan investasi seiring dengan berjalannya program vaksinasi Covid-19 dan membaiknya aktivitas ekonomi domestik maupun global sehingga meningkatkan keyakinan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Dari sisi lapangan usaha (LU), pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mendorong mayoritas LU khususnya LU perdagangan dan LU transportasi. Di samping itu, peningkatan permintaan CPO dan karet serta peningkatan harga yang signifikan pada tahun 2021 turut mendorong kinerja LU pertanian dan LU industri pengolahan” (sumber :[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat rata-rata mengalami pertumbuhan yang cukup baik, kecuali pada Kabupaten Kep. Mentawai tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar -1.85% dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi setiap tahun, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi paling besar terjadi di kota Bukittinggi pada tahun 2019-2020 yaitu sebesar 7.58% ( pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi di Bukittinggi sebesar 5.84% dan turun pada tahun 2020 menjadi sebesar -1.74%), angka ini merupakan penurunan paling besar dibanding penurunan kab/kota lainnya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh sektor perdagangan, pariwisata dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan kota Bukittinggi dan pada tahun yang sama pandemic covid-19 mulai menyebar ke Indonesia yang menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berkala besar.

PSBB merupakan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran virus atau wabah dengan membatasi aktivitas sosial dan masyarakat beraktivitas dirumah saja. Kebijakan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena adanya penghentian sementara operasional bisnis, penutupan toko, restoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan lainnya. Pengaruh dari pembatasan sosial ini terhadap pertumbuhan ekonomi bisa sangat signifikan. Ketika bisnis harus menutup sementara atau mengurangi operasionalnya, maka pendapatan mereka juga akan menurun. Hal tersebut dapat berimbas pada kenaikan angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat. Namun, kebijakan PSBB dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat sehingga tidak terjadi penyebaran wabah yang lebih parah.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang paling besar yaitu sebesar 2,52% terjadi pada tahun 2020-2021 yaitu di kabupaten Pasaman yaitu dari sebesar -0,87% menjadi 3,39%. Kabupaten Pasaman ini bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian akibat dampak dari pandemic covid-19 yaitu dengan mendorong distribusi output dari pertanian dan perikanan yang mana dari kedua sektor inilah yang menjadi sumber utama dari pendapatan Kabupaten Pasaman.

Berikut merupakan tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017–2021 (Persen)**

No	Lokasi	Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Barat				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kep. Mentawai	5,12	4,89	4,73	-1,85	2,89
2	Pesisir selatan	5,41	5,32	4,78	-1,11	3,37
3	Solok	5,32	5,19	5,04	-1,12	3,32
4	Sijunjung	5,26	5,07	4,81	-1,10	3,15
5	Tanah datar	5,11	5,04	4,99	-1,13	3,30
6	Padang pariaman	5,58	5,44	2,40	-1,46	2,18
7	Agam	5,43	5,23	4,78	-1,38	3,70
8	Lima puluh kota	5,33	5,23	5,06	-1,16	3,33
9	Pasaman	5,08	4,97	4,80	-0,87	3,39
10	Solok selatan	5,15	5,00	4,86	-1,24	3,35
11	Dharmasraya	5,44	5,28	4,94	-1,39	3,42
12	Pasaman barat	5,34	5,21	4,45	-1,34	3,75
13	Padang	6,23	6,06	5,64	-1,86	3,66
14	Solok	5,76	5,65	5,49	-1,42	3,56
15	Sawahlunto	5,74	5,50	5,31	-1,27	2,49
16	Padang panjang	5,80	5,71	5,56	-1,44	3,46
17	Bukittinggi	6,08	6,00	5,84	-1,74	3,61
18	Payakumbuh	6,12	6,02	5,89	-1,65	3,58
19	Pariaman	5,61	5,47	5,30	-1,32	3,53
	Sumatera barat	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29

*Sumber: BPS Sumatera Barat*

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak

yaitu antara eksekutif dengan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak eksekutif bertugas membuat rancangan APBD yang sesuai kebijakan tersebut, kemudian pihak legislatif menetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dirapatkan.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Adi, 2012). Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Menurut (Wertianti & Dwirandra, 2013) Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Alokasi

belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Wandira, 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah dan dapat pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing. Dalam era Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik.

Pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal APBD nya akan semakin berkurang. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Laju perekonomian di suatu daerah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana di daerah tersebut, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Siswiyanti, 2015). Hal ini senada dengan hasil penelitian oleh (Kusumawati & Wiksuana, 2018) Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang ada di daerah tersebut, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya juga semakin tinggi.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Menurut (Mardiasmo, 2009) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Hasil penelitian sebelumnya oleh (Dewi & Suputra, 2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan yuliana (2014) menyatakan bahwa pendaptan asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2016) menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Siswiyanti, 2015), (Putri, 2015), (Rori et al., 2016)

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian sebelumnya berbeda yang dilakukan oleh (Paat et al., 2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)**

No.	Lokasi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kep. Mentawai	68.477.676	79.851.330	40.063.395	34.866.883	55.773.336
2.	Pesisir selatan	176.902.866	125.080.485	134.804.594	132.752.560	145.952.090
3.	Solok	113.269.815	71.710.967	74.595.778	70.572.545	75.264.756
4.	Sijunjung	107.915.721	73.319.762	83.906.454	90.736.415	87.414.343
5.	Tanah datar	172.812.023	152.110.032	129.785.828	122.247.542	130.569.005
6.	Padang pariaman	141.310.805	117.735.858	101.607.521	105.893.926	131.417.232
7.	Agam	161.539.091	106.081.198	123.658.589	107.162.962	110.526.600
8.	Lima puluh kota	119.771.917	84.798.043	85.168.153	77.429.483	102.717.000
9.	Pasaman	142.748.233	98.526.149	98.595.691	92.578.810	91.879.234
10.	Solok selatan	75.588.033	23.848.000	67.842.785	76.868.310	75.220.606
11.	Dharmasraya	98.937.393	80.085.859	78.882.919	82.877.841	84.116.605
12.	Pasaman barat	158.920.863	102.623.195	104.052.818	108.856.844	114.205.396
13.	Padang	548.653.179	601.248.595	546.108.570	499.895.722	889.902.818
14.	Solok	41.852.774	49.000.000	41.651.875	40.546.983	40.843.356
15.	Sawahlunto	63.082.759	65.580.287	57.170.994	59.537.385	63.491.008
16.	Padang panjang	88.837.034	140.045.000	77.323.150	79.428.803	91.298.856
17.	Bukittinggi	102.002.621	99.988.280	111.896.596	84.087.662	134.115.625
18.	Payakumbuh	116.596.479	107.516.370	104.070.234	115.996.425	107.757.183
19.	Pariaman	30.881.846	39.508.112	36.665.174	32.961.765	45.500.928
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>2.530.121.133</b>	<b>2.218.657.526</b>	<b>2.097.851.123</b>	<b>2.015.294.873</b>	<b>2.577.965.982</b>

*Sumber: Statistik Keuangan Sumatera Barat*

Dari tabel 1.2 dapat dilihat Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017 sampai



dengan tahun 2021 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terbesar terdapat di Kota Padang pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 889.902.818 , sedangkan yang terkecil terdapat di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 23.848.000.

Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Wandira, 2013). Menurut (Mardiasmo, 2012) akan lebih baik jika alokasi belanja daerah pemda di daerah lebih banyak digunakan untuk belanja modal yang berorientasi publik, sebab sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya kesenjangan fiskal yang dihadapi daerah. Diharapkan dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal maka akan menstimulasi perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif, yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah sehingga kapasitas fiskal dapat meningkat kembali dan kesenjangan fiskal dapat diminimalisir. ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Waryanto, 2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan beberapa penelitian lain sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Penelitian dilakukan oleh (Fajri, 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “hal ini disebabkan masih kurang tepatnya kebijakan pengalokasian belanja modal sehingga tidak mampu mendorong peningkatan permintaan produksi daerah”. Hasil penelitian dari (Hakim, 2014) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi akan tetapi Belanja modal pemerintah yang terdiri dari belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan terkadang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Menurut (Putri 2012) salah satu komponen yang bisa diandalkan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi daerah adalah belanja modal. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan intensitas ekonomi. Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut.

Berikut merupakan tabel Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Belanja Modal menurut Kabupaten/kota di**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)**

No.	Lokasi	Realisasi Belanja Modal Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kep. Mentawai	313.680.549	343.359.974	297.673.042	142.003.462	185.398.139
2	Pesisir selatan	256.914.361	285.974.782	324.875.577	261.934.632	264.811.990
3	Solok	204.616.665	189.207.852	194.815.396	110.707.851	170.568.138
4	Sijunjung	189.756.100	209.583.898	204.203.652	132.127.048	157.123.711
5	Tanah datar	197.916.991	185.338.702	202.885.384	107.785.756	170.030.888
6	Padang pariaman	367.120.206	305.425.405	263.182.047	182.335.821	189.560.566
7	Agam	270.015.747	229.920.478	280.827.673	135.090.688	190.157.460
8	Lima puluh kota	233.117.427	254.780.324	252.910.521	152.712.090	172.217.265
9	Pasaman	184.936.891	138.329.076	125.911.245	125.376.390	144.598.833
10	Solok selatan	230.734.913	238.322.318	210.375.471	124.585.198	121.241.076
11	Dharmasraya	270.434.562	241.664.354	228.717.093	195.046.931	191.968.383
12	Pasaman barat	263.065.434	382.045.523	261.167.537	182.357.589	220.302.348
13	Padang	397.843.408	415.171.576	491.009.057	304.984.047	473.092.614
14	Solok	140.483.121	165.819.540	115.013.289	32.739.383	94.956.103
15	Sawahlunto	122.405.870	132.185.554	94.384.258	63.699.147	109.262.817
16	Padang panjang	211.509.246	145.269.249	98.188.781	54.603.591	70.002.796
17	Bukittinggi	113.994.191	251.923.630	187.986.455	249.317.613	145.005.506
18	Payakumbuh	176.632.639	158.113.415	182.218.048	119.993.262	122.258.337
19	Pariaman	153.293.150	197.217.061	156.394.642	94.469.539	100.051.386
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>4.298.471.477</b>	<b>4.469.652.717</b>	<b>4.172.739.175</b>	<b>2.771.870.045</b>	<b>3.292.608.363</b>

Sumber: Statistik Keuangan Sumatera Barat

Dari tabel 1.3 dapat diketahui perkembangan kontribusi belanja modal tiap daerah berbeda dan berfluktuatif. Rata-rata Kontribusi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terbesar terdapat di kota padang pada tahun 2019 sebesar Rp. 491.009.057, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Solok pada tahun 2020 sebesar Rp. 32.739.383.

Telah banyak penelitian yang membahas mengenai tentang pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Barat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Firnando, Rendi (2017) tentang “ pengaruh belanja modal, pad dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di sumatera barat”. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan menunjukkan bahwa PAD, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Penelitian yang dilakukan oleh Lili Manaulisda, Hasdi Aimon (2019) mengenai “Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Sumatera Barat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja, investasi dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Minimnya penelitian yang membahas mengenai variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Barat, maka keterbaharuan dari penelitian ini ialah melihat pengaruh dari variabel Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Barat. Investasi sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana/modal yang berasal dari pemerintah. Sedangkan investasi swasta adalah penempatan sejumlah dana/modal yang berasal dari perusahaan swasta. Investasi swasta terbagi pula menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tinggi nya penanaman modal baik lokal maupun penanam modal asing di

suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kondisi ini akan menarik para investor untuk menanamkan modal, hal ini tentunya akan membawa dampak yang baik tidak hanya bagi negara saja bahkan juga untuk setiap daerah yang ada di negara yang bersangkutan. Misalnya terbukanya lapangan kerja, menambah pendapatan daerah, dan mempercepat juga kemajuan pembangunan pusat/daerah.

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Investasi Dari Proyek PMA Menurut Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021**

NO	LOKASI	REALISASI PMA SUMBAR				
		RIBU US\$				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kep. Mentawai	3.869,80	23.661,20	466,1	148,8	1.158
2	Pesisir selatan	772,6	33.512,10	3.609,30	10.892,10	3.993,00
3	Solok	653,7	2.449,90	402,9	223,9	75
4	Sijunjung	122,2	446,90	27.622,90	3.215,50	0,00
5	Tanah datar	9.364,90	3.387,10	20.478,60	3.565,50	0,00
6	Padang pariaman	711,5	2.768,80	158,60	9.956,80	114,00
7	Agam	1.151,90	746,00	3.554,80	8.778,30	1.240
8	Lima puluh kota	1.490,00	1.028,30	709,00	65,20	708,00
9	Pasaman	1.161,20	0,00	0,00	0,80	84,00
10	Solok selatan	167.093,20	52.265,70	72.467,10	13.872,80	9.342
11	Dharmasraya	3.528,20	21.104,70	4.312,50	3.557,40	4.558
12	Pasaman barat	0,00	2.026,80	4.604,40	22.660,00	7.052
13	Padang	4.442,20	37.364,70	18.601,80	48.609,00	38.325
14	Solok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sawahlunto	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Padang panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	295
17	Bukittinggi	0,00	17,50	125,90	43,30	0,00
18	Payakumbuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pariaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>194.425,20</b>	<b>180.799,70</b>	<b>157.113,90</b>	<b>125.589,40</b>	<b>66.943</b>

*Sumber: DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat*

Dari tabel 1.4 diatas terlihat bahwa PMA dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi. PMA dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai mencapai US\$ 66.943,- sedangkan PMA dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka mencapai US\$ 194.425,20,-. Dengan tingginya jumlah penanaman modal asing di kabupaten/kota di Sumatera Barat, diharapkan bisa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Barat. Meskipun tidak semua daerah di provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan investasi dari penanam modal asing tersebut.

Melalui peningkatan belanja modal diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penggalan pendapatan asli daerah dan pengalokasian belanja modal sebagai modal pembangunan daerah diharapkan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan alokasi berbagai sumber daya secara lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang dibutuhkan publik.

Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Barat diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat diukur dengan melihat PDRB. Peningkatan pada pendapatan akan mendorong jumlah investasi yang tinggi, baik dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Meningkatnya permintaan akan barang dan jasa

akan meningkatkan kebutuhan akan modal investor untuk membiayai investasinya pada suatu daerah tertentu, kemudian akan mempengaruhi investasi di dalam negeri.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017-2021, data yang diteliti adalah data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, realisasi total pendapatan asli daerah (PAD), realisasi belanja modal dan investasi (PMA) pada tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time series* dan *cross section*. Data *time series* periode tahun tahun 2017-2021 sedangkan *cross section* adalah 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Penulis ingin mengkaji bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis termotivasi untuk meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 “

## **B. Rumusan Masalah**

1. Sejuahmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2017-2021 ?
2. Sejuahmana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2017-2021 ?
3. Sejuahmana pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Sumatera Barat tahun 2017-2021 ?

4. Sejauhmana pengaruh PAD, Belanja Modal dan Investasi secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2017-2021 ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh dari Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2017-2021
3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh dari Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2017-2021
4. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh PAD, Belanja Modal dan Investasi secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2017-2021

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang didapatkan berguna bagi berbagai pihak sebagai berikut :

- a) Secara teoritis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai PAD, Belanja Modal dan tingkat investasi penanaman modal asing di Provinsi Sumatera Barat dan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat



bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta gambaran kepada masyarakat umum tentang perekonomian Sumatera Barat pada pendapatan asli daerah, belanja modal dan penanaman modal asing. Sehingga masyarakat umum mengetahui pengaruh PAD, belanja modal dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dengan terus menggali sumber daya yang ada untuk digunakan semaksimal mungkin sebagai lahan untuk berinvestasi sehingga dapat memperkaya dan menambah pemasukan daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan kearah yang lebih baik.